

**Kesimpulan dan Rekomendasi**  
**WORKSHOP “BERBAGI PENGETAHUAN & SUMBERDAYA KEUANGAN**  
**MIKRO DI INDONESIA”**  
**Bank Indonesia, 27 Agustus 2004**

**Oleh : Bambang Ismawan**

Workshop “Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia” yang diselenggarakan di Bank Indonesia, Jakarta tanggal 27 Agustus 2004 dapat dikatakan berjalan dengan sukses. Workshop ini dihadiri oleh banyak stakeholder dari berbagai lembaga seperti pemerintah, perbankan, sektor riil, LSM, peneliti dan sebagainya. Workshop ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang dipilih secara khusus.

Sukses lainnya adalah kehadiran Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, yang baru saja datang dari Jepang tadi malam. Kehadiran Gubernur dalam workshop ini merupakan suatu pemihakan yang sangat terasa bagi kita. Untuk itu kita memberikan penghargaan kepada Bank Indonesia (BI) karena telah memberikan komitmen dan fasilitas yang merupakan kekayaan dari lembaga ini. Dan juga terhadap komitmen dari pimpinannya terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan keuangan mikro.

Kita memahami bahwa tugas BI tidak lagi mengurus hal-hal yang kita bahas saat ini. Tugasnya adalah tugas moneter. Bahkan tadi disebutkan oleh Deputy Direktur Pengawasan BPR, Sri Mulyati, BI tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kemiskinan. Tapi seperti yang telah dikemukakan oleh Burhanuddin Abdullah, karena sebagian besar usaha di Indonesia adalah UMKM, maka BI tetap menaruh perhatian terhadap usaha-usaha ini. Ini suatu komitmen kelembagaan.

Realita menyatakan usaha mikro merupakan mayoritas pelaku ekonomi dan tulang punggung ekonomi Indonesia. Bahkan telah disebutkan dari beberapa kesaksian, bahwa saat krisis hal ini menjadi kebanggaan kita. Masalah yang mereka hadapi begitu banyak. Salah satunya adalah akses terhadap pelayanan keuangan.

Pemberdayaan usaha mikro melalui keuangan mikro akan memiliki dampak terhadap penanggulangan kemiskinan, pemberantasan pengangguran dan berkontribusi dalam menyempitkan kesenjangan sosial.

Berbagai pihak telah mengambil banyak inisiatif untuk memberikan pelayanan keuangan mikro yang dilakukan pemerintah, perbankan, LSM, dan kelompok bisnis. Dampak dari berbagai inisiatif itu adalah terbentuknya berbagai modal baik finansial maupun sosial. Konkritnya terakumulasi dana yang cukup besar. Di Bank Indonesia telah difasilitasi suatu Kesepakatan Bersama antara BI dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) tentang pemberdayaan UMKM. Dengan demikian akumulasi dana yang cukup besar itu dapat termonitor.

Berbagai metodologi, skill dan pengalaman-pengalaman mencuat dan dipamerkan dengan berbagai inovasi. Muncul berbagai kelompok-kelompok yang semakin solid karena pendampingan dan pembinaan yang intensif. Banyak LKM lama telah menjadi maju dan LKM-LKM baru banyak yang muncul.

Muncul berbagai inovasi dari LKM antara lain Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat yang selama lima tahun telah mereplikasi Grameen Bank dan Bina Swadaya dengan pelayanan keuangan mikro ala ASA. Juga muncul berbagai bentuk pendampingan, seperti yang dilakukan oleh BKKBN. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ini bukan hanya menjadi milik BKKBN saja, tapi dapat direplikasi oleh semua pihak yang terlibat dalam pendampingan. Hal ini menyatakan bahwa banyak paradigma yang telah membuka diri terhadap mekanisme atau kerja sama baru dan telah terungkap dengan baik.

Dari modal yang telah kita capai itu, ternyata ada tantangan-tantangannya. Tantangan itu adalah :

1. Upaya yang dapat membuat modal tersebut dapat melayani sektor ekonomi mikro melalui layanan keuangan mikro secara lebih efektif. Ini dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu :
  - a. Mengembangkan kerangka legal yang sesuai. Dengan membuat Undang-undang (UU) atau peraturan baru. Dapat juga dimasukkan dalam UU yang sudah ada. Intinya adalah agar orang-orang yang berkecimpung dalam keuangan mikro mendapat legalitas. Mereka bukan melakukan *illegal banking*, yang kan kesulitan bila mereka sukses.
  - b. Dibutuhkan pengembangan kebijakan nasional yang komprehensif. Kita melihat banyak inisiatif dan masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Bila kita bertemu, ada yang gembira karena sukses dan ada yang frustrasi karena usahanya gagal. Ini semua tidak terangkum dan mendapat kebijakan nasional yang memadai.
  - c. *Linkage program*. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan kembali program ini.
  - d. Penguatan kapasitas. Banyak yang menyatakan ingin belajar lebih lanjut lagi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Yang dibutuhkan adalah tidak hanya antara LSM, KSM, Perbankan tapi juga lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki program – program ke arah itu. Proses saling belajar di antara kita, bukan sesuatu yang perlu diakhiri tapi perlu diteruskan.
2. Perlunya Apex Institution untuk keuangan mikro. Abdul Salam dari PNM menggambarkan adanya suatu *grand apex*, sub-sub apex. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dan dipahami serta dicoba untuk mengetahui bagaimana efektifitasnya.

Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan suatu mekanisme yang sebenarnya sudah diidentifikasi saat Temu Nasional yaitu dengan mengefektifkan berfungsinya LKM Center. Lembaga ini memiliki sejumlah fungsi yang dapat dijadikan tempat untuk belajar bersama.

- a. Mengembangkan baseline data keuangan mikro. Kekayaan yang begitu besar. Apakah benar dapat menjadi suatu industri yang mendukung 98% usaha di Indonesia.
- b. Fasilitasi *linkage* dari demand side dengan supply side
- c. Men-generate capacity building untuk demand side & supply side
- d. Sosialisasi berbagai data dan info yang relevan ke daerah-daerah.

Perlu diingat bahwa keputusan mengenai LKM Center saat Temu Nasional, sebaiknya diselenggarakan atas kerja sama berbagai stakeholder seperti BI, Gema PKM dan Departemen Keuangan. Mungkin dapat menggunakan salah satu ruangan di Bank Indonesia dan dapat memungkinkan para stakeholder untuk dapat hadir.

Dalam website BI telah ada LKM Center. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak semua LKM dan pelaku bisnis mengisi data mereka. Hanya BPR, BKD dan BRI Unit. Untuk mengisi data ini dapat menghubungi Direktorat Pengawasan BPR Bank Indonesia. Dari

lima fungsi yang tadi diusulkan, satu fungsi telah dilakukan oleh BI. Ada baiknya BI tidak menggunakan ini *for microfinance* saja. Tapi juga untuk *for, with and by community of microfinance*.

Mengingat daya tarik pertemuan yang diselenggarakan di BI lebih besar daripada diselenggarakan di tempat lain. Mungkin dapat dilaksanakan pertemuan dua minggu satu kali. Disarankan tiap pertemuan tidak membahas banyak hal, tapi hal yang lebih spesifik. Disinilah kita dapat menjalin persaudaraan sejati diantara pelaku, yang berkeinginan agar keuangan mikro menjadi suatu yang memasyarakat sehingga banyak orang miskin yang bisa dijangkau, pengangguran diatasi dan ekonomi Indonesia menjadi lebih tangguh.(\*)